

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum pemerintahan adalah suatu organisasi atau badan yang diberi legitimasi (keabsahan) oleh masyarakat umum sebagai suatu kelompok yang mempunyai kualifikasi tinggi untuk melaksanakan tugas pemerintahan (negara) dan dilengkapi dengan sumber daya negara. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa fokus utama pemerintahan khusus ini adalah strukturnya sebagai sebuah organisasi atau Lembaga, yang merupakan organisasi sah yang digunakan masyarakat umum untuk mengungkapkan keprihatinannya melalui proses pemilihan umum. Hal ini juga mencakup aparat keamanan nasional sebagai alat pemantauan utama terhadap tugas-tugas pemerintahan tersebut di atas. Oleh karena itu, kekuasaan pemerintahan hanya sebatas menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif sesuai dengan kepentingan masing-masing organisasi yang terkena dampak peraturan-peraturan tersebut. (Maulidiyah, 2014).

Penegakan hukum yang baik oleh pemerintah tampaknya mempertimbangkan kebutuhan setiap konstituen, termasuk anggota lingkup pengaruh pemerintah dan masyarakat umum. Pemerintahan yang baik harus dekat dengan rakyat dan secara aktif mendengarkan kebutuhan mereka. Ketika memberikan layanan, pemerintah juga harus mempertimbangkan kebutuhan ini. Kebijakan publik yang baik dapat dilihat dari cara pelaksanaannya. Hal ini sejalan dengan prinsip desentralisasi dan otonomi yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengembangkan dan mentransformasikannya secara individual melalui bantuan publik. Kondisi kualitas tenaga kerja Indonesia saat ini mendorong pemerintah untuk bertindak cepat dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja, khususnya di bidang hubungan kerja. Pada titik ini, sistem perwalian perizinan tidak konsisten, sulit digunakan, memiliki prosedur yang sangat kaku, dan tidak memberikan jangka waktu yang diperlukan. Salah satu indikator keberhasilan otonomi daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang baik sehingga masyarakat umum dapat memperolehnya secara tepat waktu, mudah, dan ramah sesuai harapan masyarakat yang telah ditetapkan.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat UUD 1945, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah menerapkan strategi melalui pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Salah satu strategi pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan yang baik dan efisien kepada masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab pada awal reformasi tidak lepas dari keinginan untuk mewujudkan struktur pemerintahan yang demokratis, yaitu struktur pemerintahan yang memberikan kewenangan lebih kepada daerah dan rakyat untuk mengatur dan menyelesaikan permasalahan daerah. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public, Pemerintahan Daerah secara terus menerus meningkatkan pelayanan public (Rahmadana et al., 2020). Untuk meningkatkan pelayanan sektor publik, tersedia lebih banyak sumber daya untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan jenis layanan tertentu yang dibutuhkan masyarakat umum. Sehubungan dengan hal tersebut, keinginan masyarakat untuk mendapatkan layanan berkualitas secara konsisten semakin meningkat. Tumbutan seperti ini semakin sejalan dengan hak keadilan rakyat perang nasional dan kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan keadilan. Tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik tidak hanya sebatas menciptakan pelayanan yang efisien; hal ini juga mencakup bagaimana layanan dapat diberikan tanpa mengorbankan status masyarakat yang dilayaninya. Salah satu asas filosofi otonomi daerah adalah bahwa untuk dapat memberikan bantuan yang baik kepada masyarakat, perlu dipahami sejauh mana permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Setelah permasalahan pelayanan masyarakat diinventarisasi dan dianalisis, maka harus dilaksanakan strategi kebijakan publik yang efektif dan selaras dengan karakteristik daerah dan warganya.

Dalam hal ini tenaga administrasi begitu penting dalam sebuah lembaga formal atau non formal demi mencapai visi, misi dan tujuan sebuah lembaga melalui peningkatan mutu layanan administrasi melalui tenaga administrasi. Berdasarkan analisis diatas maka peneliti melakukan penelitian tentang strategi pelayanan Administrasi di Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Kudus

(KESBANGPOL). Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan penulis di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik permasalahannya yaitu terletak pada kualitas teknologi dalam pelayanan administrasinya belum maksimal. Hal itu dibuktikan dengan proses pelayanan administrasi contohnya dengan penyelesaian surat menyurat, minimnya publikasi di website terkait permohonan persyaratan yang dibutuhkan oleh pemohon, kurangnya pemahaman pemohon dalam melengkapi dokumen persyaratan, hal ini berarti tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kurangnya ketelitian pemohon dalam melaksanakan pengetikan surat menyurat maksudnya yaitu sering terjadinya kesalahan dalam penulisan surat menyurat contoh kesalahan yang sering terjadi salah penomoran surat, peletakan tanda baca, dan lain sebagainya. Selain itu, salah satu akar persoalan terkait dengan belum optimalnya layanan administrasi di Kesbangpol terletak pada efektivitas pelayanan administrasi yang masih manual dan semi komputerisasi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diungkapkan diatas maka dalam hal ini penulis mengambil judul “Sistem Pelayanan Administrasi Kesbangpol Berbasis Website di Kabupaten Kudus”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana strategi pelayanan administrasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus.

1.3 Batasan Masalah

1. Sistem pelayanan administrasi ini diterapkan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus.
2. Kategori pada Pelayanan terdiri dari Surat Penerbitan rekomendasi penelitian (SIP), surat keterangan terdaftar (SKT), dan surat keterangan tanda lapor (SKTL).

1.4 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di tetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Merancang Sistem Pelayanan Administrasi Kesbangpol Berbasis Website.
2. Mempermudah Kesbangpol dalam melakukan pelayanan administrasi.
1. Mempermudah pemohon dalam mengajukan berkas permohonan.

1.5 Sistematika penulisan

Berikut ini merupakan sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan laporan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan Dalam bab ini mengemukakan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori Dalam bab ini menjelaskan tentang penelitian terkait, landasan teori yang digunakan dalam pembahasan penulisan laporan skripsi, dan kerangka pemikiran.

BAB III : Metodologi Penelitian Dalam bab ini menjelaskan tentang bagaimana cara penulis mengolah data yang berisi tentang metode pengumpulan data, metode pengembangan sistem dan analisa kebutuhan sistem.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan Dalam bab ini menjelaskan tentang analisa masalah, analisa perancangan sistem, pengujian sistem, dan perawatan.

BAB V : Penutup Dalam bab ini mengemukakan kesimpulan dari bab 1 – 4 serta saran dari penulis untuk pengembangan sistem dimasa mendatang.